

DAFTAR PUSTAKA

1. Prof. DR. Amir Syarifuddin (*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*) hal. 303
2. Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia* cet. vi, Bandung, Sumur Bandung
3. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, op. cit, hlm 252
4. IN, (salah seorang warga desa Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan), *Wawancara*, Tanggal 14 February 2019.
5. EN (salah seorang warga desa Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan) wawancara tanggal 12 Februari 2019)
6. Kyai, maskub, (tokoh para ulama' di Kelurahan Muktiharjo Kidul), *Wawancara*, Tanggal 24 Oktober 2018.
7. Ali Yusub As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzahjl.sawo raya No 18, 2010), h. 348
8. Selamat Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1, h. 133
9. Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta timur: Pustaka Al-kautsar, 2006)
10. Undang-undang nomer 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, citra umbara, 2012) hlm. 334.
11. Amir, Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam* (antara fikih dan UU Perkawinan)
12. Basyir, Azhar, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UIIP Press.
13. Al-Jaziri, Kitabu al-fiqh al-madha fihih al-arba'ah, hlm. 8
14. Departemen Menteri Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Trinity Uptima Media, 2007), hlm. 10
15. Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh al-madha fihih al-Arba'ah*, hlm. 21-23
16. Ahmad Iksan, 1986, *Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam*, Jakarta, Pradnya Paramita.
17. Hazairin, 1975, *Tinjauan Mengenal Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974*, Jakarta, Tintamas Indonesia.
18. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terj. R. Soebekti, S.H. dan R. Tjitrosoedibio, cet. ke-6, Jakarta, Pradnya Paramita.
19. Zainal Abidin Abubakar, 1995, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al-hikmah.
20. Zarkowi Soejoeti, 1983, *Sejarah Penyusunan KHI di Indonesia dalam Moh. Mahfudz MD, dkk. (Edit.) 1983*, Pengadilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta, UII press.
21. <https://kbbi.web.id/cerai>, pisah putus hubungan sebagai suami istri: baik cerai mati, hidup.
22. H. Sulaiman *Rasjid, fiqh Islam*, Cet. 80, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017, hlm. 414-417
23. Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* hlm 303-319.
24. Anshori, Abdul Ghofur. 2002, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia
25. Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.press.

26. Abi ‘Abdillah bin Muhammad bin Yazid ibn Majah, *Sunan ibn Majah* (Riyadh, Bait Al-afkar Al-Dauliyat, it) hlm. 219.
27. Al-bukhari, Sahih Bukhari juz, 5, (Beirut libanon: Dar Al-kutub Al-ILMIYAH, 1992) HLM. 337
28. Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 320
29. Anshary, H.M, 2014, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung :Mandar Maju
30. Anshary, H.M, 2014, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung :Mandar Maju.
31. Budiono, Abdul Rachmad. 2003, *peradilan Agama dan Hukum Islam di indonesia*, Malang: Bayumedia publishing.
32. Wawancara dengan Runtut Nurjati salah satu warga Desa Muktiharjo Kidul pada tanggal 11 february 2019
33. Wawancara dengan Ina Handayani salah satu warga Desa Muktiharjo Kidul pada tanggal 15 february 2019
34. Wawancara dengan Mariyatun salah satu warga desa Muktiharjo Kidul pada tanggal 16 february 2019
35. Wawancara dengan Anna Setiya Pertiwi salah satu warga desa Muktiharjo Kidul pada tanggal 17 february 2019
36. Wawancara dengan Eni Ruhyati salah satu warga desa Muktiharjo Kidul pada tanggal 18 february 2019.
- 37 Wawancara dengan bapak Bashori salah satu pegawai KUA Kecamatan Pedurungan pada tanggal 24 oktober 2018.
- 38 Juhaya Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995, hlm. 69
- 39 Departemen Agama, op.cit. hlm 37.
- 40 Ibid, hlm. 275
41. Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm, 94-96
42. Wawancara dengan tokoh ulama yang bernama bapak kyai maskub pada tanggal 12 february 2019
43. Wawancara dengan tokoh masyarakat yang bernama bapak H.karmindar pada tanggal 12 february 2019